

BAB III

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 025/0/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

(Studi Kasus : Kenaikan Pangkat Guru Pembina (IV/a) ke atas di Kecamatan
Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010)

A. Karakteristik Responden

Sasaran penelitian ini adalah para guru yang sudah menduduki jabatan Pembina golongan IV/a, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas TK/SD/SDLB dan Kepala Sekolah Kecamatan Sulang.

Tabel 3.1 Responden Penelitian dirinci Menurut Kelompok Sasaran

No	Kelompok Sasaran	Jumlah	Prosentase
1.	Kepala Sekolah dan Guru Gol. IV/a	48	92,31
2.	Kepala Cabang Dinas	1	1,92
3.	Pengawas TK/SD/SDLB	3	5,77
Jumlah		52	100,00

Sumber : Data Responden Penelitian Diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden penelitian ini sebanyak 52 orang yang terdiri dari guru dan kepala sekolah 48 orang dan 4 orang pejabat sekaligus tim angka kredit pada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sulang.

Karakteristik responden dirinci menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 3.2. Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur

No	Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	40 – 45	6	4	10	19,23
2.	46 – 50	9	7	16	30,77
3.	50 – 55	11	8	19	36,54
4.	> 55	5	2	7	13,46
Jumlah		31	21	52	100

Sumber : Data Responden Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak berumur 50-55 tahun sebanyak 19 orang (36,54%) dan yang paling sedikit responden berumur 55 tahun ke atas sebanyak 7 orang (13,46%).

Semua responden berstatus kawin jika dirinci berdasar jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 3.3. Karakteristik Responden Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	31	59,62
2.	Perempuan	21	40,38
Jumlah		52	100

Sumber : Data Responden Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden terbanyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang (59.62%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang (40,38%).

Karakteristik responden dirinci berdasarkan tempat tugas/mengajar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Karakteristik Responden Dirinci Berdasar Tempat Tugas

No	Tempat Tugas/Mengajar	Jumlah	Prosentase
1.	Taman Kanak-kanak	2	3,85
2.	Sekolah Dasar	38	73,08
3.	SLTP	4	7,69
4.	SLTA	4	7,69
5.	Pejabat Cabang Dinas/TPAK	4	7,69
Jumlah		52	100

Sumber : Data Responden Diolah

Berdasarkan data di atas maka responden terbanyak bertugas di Sekolah Dasar sebanyak 38 orang (73,08%) dan responden paling sedikit bertugas di Taman Kanak-Kanak sebanyak 2 orang (3.85%).

Selanjutnya disajikan karakteristik responden tentang tugas lain yang diemban di sekolah selain tugas pokok sebagai guru.

Tabel 3.5. Karakteristik Responden Rinci Berdasar Tugas Lain yang Diemban di Sekolah Selain Guru

No	Tempat Tugas/Mengajar	Jumlah	Prosentase
1.	Kepala Sekolah	36	69,23
2.	Wakasek	4	7,69
3.	Wali Kelas	5	9,62
4.	Komite Sekolah	3	5,77
5.	Pejabat Cab. Dinas/TPAK	4	7,69
Jumlah		52	100

Sumber : Data Responden Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar Responden adalah Kepala Sekolah, yaitu sebanyak 36 orang (69,23 %) dan yang menjadi Komite Sekolah paling sedikit yaitu 3 orang (5,77%).

Guru yang secara rutin tiap hari bertugas mengajar siswa di depan kelas dalam kaitannya dengan pengembangan karier masih dituntut untuk melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, karena dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknik Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angkat Kreditnya, pengabdian masyarakat merupakan unsur penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian untuk meningkatkan wawasan nilai afektif, kognitif dan psikomotorik untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini adalah ikut terjun langsung dalam organisasi kemasyarakatan.

Berikut ini disajikan tabulasi jawaban responden dalam kegiatan organisasi keagamaan.

Tabel 3.6 Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Kegiatan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang (Abdul Kholik, S.Ag, S.Pd)	Seseorang yang mendapat amanah berupa jabatan di tempat tugas, di tengah-tengah masyarakat kita biasanya masih dibawa-bawa, hal ini membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang dianggap sebagai panutan mau tidak mau harus aktif dan terlibat langsung dalam organisasi sosial baik kemasyarakatan maupun keagamaan.
2.	Pengawas TK-SD (Nur Afif, S.Pd)	Di dalam masyarakat yang agamis apalagi agraris, keberadaan kami selalu dituakan di lingkungannya, dengan sendirinya kami pun harus bisa menyesuaikan dengan predikat yang diberikan oleh masyarakat.
3.	Kepala Sekolah	Bertugas menjadi guru yang diberi tambahan sebagai kepala sekolah adalah merupakan pekerjaan yang sudah cukup melelahkan, banyak menyita waktu dan tenaga, tetapi jika ikut dalam kegiatan organisasi sosial apalagi keagamaan seakan-akan terobati dan timbul semangat untuk bekerja yang lebih giat.
4.	Guru	Hampir semua guru di Kecamatan Sulang aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, hal ini terdorong karena pengabdian kepada masyarakat lewat organisasi sosial keagamaan merupakan ibadah yang ikhlas, timbul dari kesadaran pribadi.

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dan pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa hampir semua responden giat dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah).

Kegiatan guru dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung aktif

dalam organisasi kemasyarakatan. Menurut Bapak Abdul Kholik dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membantu sekolah dalam pelaksanaan kemasyarakatan di mana guru melaksanakan tugas yang diberikan kepada sekolah seperti membuat dan melaksanakan program kemasyarakatan dan kunjungan ke rumah siswa.
- b. Melaksanakan kode etik guru yang merupakan seperangkat aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Sehingga menjadi manusia yang terpuji di mata masyarakat sekaligus menjadi cermin masyarakat.
- c. Membuat dirinya lebih baik lagi di sekolah dan masyarakat akhirnya bisa menjadi sosok teladan bagi masyarakat.

Di samping aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan semua guru aktif dalam organisasi profesi seperti PGRI, KKKS, MGMP dan KKG, hal ini terkait dengan jabatan guru sebagai suatu profesi. Kegiatan guru dalam organisasi profesi sudah berjalan dengan tuntutan profesionalisme guru dalam meningkatkan kompetensinya, lewat kegiatan tersebut responden dapat menimba ilmu, pengalaman pengetahuan dan keterampilan.

B. Implementasi Kebijakan Kepmendikbud No. 025/0/1995

1. Kriteria kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas

a. Persyaratan kenaikan pangkat Golongan IV/a ke Atas

Pemahaman tentang persyaratan kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas merupakan modal dasar bagi responden untuk dapat meraih atau memenuhi persyaratan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995. Untuk mengetahui sejauh mana responden mengetahui persyaratan kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke atas yang ditetapkan dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995, disajikan tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 3.7 Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Sejauh Mana Pengetahuan tentang Persyaratan Kenaikan Pangkat

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Sebagai seorang yang diberi tanggung jawab membina dan mengurus kepegawaian guru termasuk kenaikan pangkat di tingkat kecamatan, maka secara terus menerus mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku disosialisasikan kepada guru.
2.	Pengawas TK-SD	Hal itu adalah merupakan sebagian tugas pokok kami yang harus dicermati dan dipahami sebelum disampaikan kepada kepala sekolah maupun guru.
3.	Kepala Sekolah	Kenaikan pangkat adalah harapan dan keinginan semua guru, untuk mengetahui persyaratan tersebut semua guru harus membaca Kepmendikbud No. 025/0/1995 yang sudah diberikan dari dinas kepada semua sekolah
4.	Guru	Semua persyaratan kenaikan pangkat termuat dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995, keputusan tersebut ada di sekolah dan selalu dibaca oleh guru yang akan naik pangkat untuk mempersiapkan berkas pengusulan, tapi ada suatu persyaratan yang sangat berat untuk dilaksanakan.

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas serta pengamatan serta pengamatan melalui wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa semua responden 100% sudah pernah membaca peraturan dan persyaratan kenaikan pangkat yang harus dipenuhi oleh guru pembina golongan IV/a ke atas, namun semua responden sejumlah 52 orang juga menyatakan tidak sanggup dan merasa keberatan terhadap persyaratan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa berat bobot persyaratan yang harus dipenuhi, disajikan tabulasi jawaban sebagai berikut :

Tabel 3.8 Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Seberapa Berat Bobot Persyaratan Kenaikan Pangkat

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Pemenuhan persyaratan kenaikan pangkat yang berupa pengembangan profesi adalah merupakan hal yang baru bagi para guru, apalagi guru yang jenjang pendidikannya baru SPG, hal ini merupakan momok bagi mereka yang sangat memberatkan
2.	Pengawas TK-SD	Pada dasarnya sebagian besar persyaratan terkait erat dengan tugas pokok guru, namun untuk pengembangan profesi kami pun merasa berat, karena selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai juga dituntut pendanaan yang mencukupi.
3.	Kepala Sekolah	Sebaiknya untuk kenaikan pangkat guru pembina Gol. IV/a ke atas khususnya SD dikembalikan dengan sistem kenaikan pangkat otomatis (KPO) agar tidak terjadi stagnasi yang berkepanjangan. Hal ini diharapkan sebagai sumbangsih kepada guru yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
4.	Guru	Daripada pusing-pusing memikirkan persyaratan kenaikan pangkat yang di luar kemampuan kita, lebih baik menunggu kenaikan pangkat pengabdian.

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas dan pengamatan peneliti maka jelas bahwa pengembangan profesi merupakan persyaratan kenaikan pangkat yang sangat memberatkan sekaligus menjadi kendala utama bagi guru. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa guru yang menduduki golongan IV/a semakin banyak dan bertambah terus setiap periode kenaikan pangkat yaitu dua kali dalam satu tahun dan sampai saat ini di Kecamatan Sulang baru ada satu guru atau kepala SD yang bisa menduduki golongan IV/b.

Untuk mengetahui sejauh mana kesulitan responden dalam pembuatan pengembangan profesi disajikan tabulasi jawaban sebagai berikut :

Tabel 3.9 Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Pernah Mempelajari dan Membuat Pengembangan Profesi

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Teori tentang pengembangan profesi pernah kami pelajari karena menyangkut bidang tugas sehari-hari, tapi yang lebih janggal kenaikan pangkat Kacabdin Pendidikan tidak menggunakan persyaratan tersebut. Jadi cuma sebatas mempelajari untuk disampaikan berupa teori tanpa praktek lebih dahulu.
2.	Pengawas TK-SD	Secara terus terang meskipun tugas kami menyosialisasikan persyaratan tersebut kepada kepala sekolah dan guru, kami belum pernah mengusulkan kenaikan pangkat ke IV/b karena kurang menguasai di bidang profesi yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pendanaan.

3.	Kepala Sekolah	Penataran pengembangan profesi serta penjelasan dari dinas pendidikan yang pernah kami ikuti belum dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh guru, karena penataran hanya sebatas teori tidak dipraktekkan di lapangan.
4.	Guru	Sebagai seorang guru di sekolah dasar yang berada di pedesaan dengan pendidikan cuma SPG persyaratan tersebut dirasakan sangat berat dan sangat sulit untuk dikerjakan baik dari segi teori apalagi pendanaan.

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan jawaban pada tabel di atas dan kajian di lapangan dapat diketahui bahwa semua responden sebanyak 52 orang termasuk 4 orang pejabat di Kecamatan Sulang, belum pernah membuat karya ilmiah di bidang pendidikan. Upaya untuk membina guru dan tim penilai angka kredit terus dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan nasional, baik melalui rapat-rapat dinas seperti KKPS, KKKS, MGMP, KKG maupun penataran dan pelatihan.

Pelatihan merupakan proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pemikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.

Adapun tujuan pelatihan adalah :

- a. Tujuan latihan induksi yaitu untuk membantu pegawai menyelesaikan pekerjaan yang baru dan untuk memberikan kepadanya beberapa ide mengenai perusahaan dan latar belakang pekerjaannya.

- b. Tujuan latihan dalam tugas yaitu untuk memberikan instruksi khusus guna melaksanakan tugas-tugas dari suatu pekerjaan tertentu.
- c. Tujuan latihan pengawasan yaitu untuk mengajar pegawai-pegawai bagaimana memeriksa dan mengawasi serta melatih pegawai-pegawai lainnya.
- d. Tujuan latihan manajemen yaitu melatih untuk satu jabatan dalam manajemen puncak, seperti sekretaris, akuntan dan lain-lain.
- e. Tujuan pengembangan pimpinan yaitu untuk mengembangkan dan menambah kemampuan pemimpin-pemimpin yang sudah ada.

Para guru sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang pengembangan profesi karena sebagian besar telah mengikuti penataran maupun membaca buku-buku tentang karya ilmiah. Namun untuk memahami tentang tata cara pembuatan dan sistematika penulisan sulit sekali bagi guru yang pendidikannya hanya sampai tingkat SLTA apalagi usianya di atas 45 tahun.

Selain pembuatan karya ilmiah di bidang pendidikan, pengembangan profesi dapat diperoleh melalui kegiatan lain meskipun bobot kreditnya lebih rendah seperti: pembuatan alat peraga pelajaran, menciptakan karya seni, menemukan teknologi tepat guna dan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengertian responden dalam pembuatan sub unsur pengembangan profesi disajikan tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 3.10 Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Pernah Membuat Sub Unsur Pengembangan Profesi

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Menurut saya kegiatan pengembangan kurikulum yang bersifat pembaruan dan penyempurnaan cuma ada di pusat. Di daerah juga sering melaksanakan kegiatan pembahasan kurikulum tapi sifatnya sekedar sosialisasi untuk dilaksanakan.
2.	Pengawas TK-SD	Kriteria menciptakan karya seni yang dimaksud dalam Kepmendikbud tersebut masih kurang jelas dan legalitasnya minimal sampai tingkat kabupaten. Jadi hal ini juga sulit untuk dilaksanakan. Kebanyakan responden membuat cuma sebatas pada pembenahan taman sekolah, kebersihan dan keindahan kelas.
3.	Kepala Sekolah	Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara rutin tiap hari guru membuat persiapan mengajar harian (PMH) namun hal ini tidak dapat dimasukkan dalam poin membuat bahan pelajaran.
4.	Guru	Kalau bicara teori memang gampang tapi prakteknya sulit setengah mati. Yang jelas tiap hari mengajar di depan kelas. Pada dasarnya semua guru SD sudah tidak tertarik dengan pengusulan kenaikan pangkat golongan IV/a ke atas karena sudah di luar kemampuan. Bagi kami lebih baik menunggu kenaikan pangkat pengabdian. Jadi masalah penemuan teknologi tepat guna sudah tidak kami pikir lagi

Sumber : Data Primer Diolah

Dalam proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan interaksi antara siswa dengan sumber belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini guru harus memiliki kemampuan untuk

mengelola kelas sehingga terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien., Mengajar adalah mengidentifikasi apa yang telah diketahui siswa dan apa yang perlu diketahui lebih lanjut serta bagaimana menstrukturnya sehingga apa yang dipelajari mudah dipahami sebagai suatu kebulatan yang utuh.

Berdasarkan hal tersebut maka persiapan mengajar bagi guru seperti membuat Perencanaan Mengajar Harian (PMH), membuat Program Semester (Promes) dan Program Tahunan (Prota) bisa dimasukkan dalam membuat bahan pelajaran. Sedangkan pengertian alat peraga yang dimaksudkan dalam kegiatan pengajuan usul kenaikan pangkat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Kepmendikbud No. 025/0/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Karya Pengembangan Profesi, yaitu :

- a. Berupa alat kelengkapan yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling.
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan lebih efektif.
- c. Alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan tersebut, mempunyai ciri-ciri:
 - 1) Ada unsur modifikasi/inovatif.
 - 2) Belum ada atau ditemukan di daerah yang bersangkutan.
 - 3) Tidak menyalin.

Bukti fisik dari alat peraga tersebut yaitu :

- a. Uraian tertulis yang berisi:
 - 1) Fungsi alat.
 - 2) Prinsip kerja alat.
 - 3) Bentuk dan wujud (gambar dan desain alat).
 - 4) Langkah perencanaan.
 - 5) Pengujian alat.
 - 6) Penggunaan alat.
- b. Keterangan dari kepala sekolah bahwa alat pelajaran/peraga atau alat bimbingan tersebut dipergunakan di sekolah.
- c. Surat keterangan keaslian hasil karya.

Dari kriteria alat peraga termasuk bukti fisik yang dipersyaratkan, maka alat peraga yang sudah pernah dibuat oleh para guru tidak bisa memenuhi, sehingga mereka tidak mendapatkan angka kredit. Kriteria yang dibuat lebih bersifat spesifik dan memberikan tingkat kesulitan bagi para guru untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan tersebut.

Demikian halnya untuk sub unsur pengembangan profesi yang lain seperti menciptakan karya seni, penemuan teknologi tepat guna bidang pendidikan dan kegiatan pengembangan kurikulum seperti yang dipersyaratkan dalam keputusan tersebut merupakan kendala bagi guru untuk dapat meraih jenjang pangkat dan jabatan guru yang lebih tinggi. Pemahaman guru terhadap suatu kurikulum merupakan suatu hal yang

sangat penting dan harus dimiliki, supaya dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.

Pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik atau siswa di sekolah. Rumusan ini mengandung konsep sebagai berikut:
 - 1) Pembelajaran merupakan persiapan di masa depan.
 - 2) Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan.
 - 3) Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan pengetahuan.
 - 4) Guru dipandang sebagai orang yang sangat berkuasa.
 - 5) Siswa selalu bersikap dan bertindak pasif.
- b. Pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Rumusan ini mengandung konsep pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Pembelajaran bertujuan membentuk manusia berbudaya.
 - 2) Pembelajaran berarti suatu proses pewarisan.
 - 3) Bahan pembelajaran bersumber dan kebudayaan.
 - 4) Siswa atau peserta didik sebagai generasi muda pewaris kebudayaan.

- c. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Rumusan ini mengandung konsep sebagai berikut:
- 1) Pembelajaran bertujuan mengembangkan atau mengubah tingkah laku peserta didik.
 - 2) Kegiatan pembelajaran berupa pengorganisasian lingkungan.
 - 3) Peserta didik merupakan organisme yang hidup.
- d. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik.
- 1) Tujuan pembelajaran adalah untuk membentuk warga negara yang baik.
 - 2) Pembelajaran berlangsung dalam suasana kerja.
 - 3) Peserta didik/siswa merupakan calon warga negara yang memiliki potensi untuk kerja.
 - 4) Guru merupakan pemimpin dan pembimbing bengkel kerja.
- e. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.
- Pengertian ini mengandung konsep sebagai berikut:
- 1) Tujuan pembelajaran adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat.

- 2) Kegiatan pembelajaran berlangsung dalam hubungan sekolah dan masyarakat.
- 3) Siswa belajar secara aktif.
- 4) Guru juga bertugas sebagai komunikator.

Mencermati penjelasan tentang pembelajaran di atas, maka guru jelas dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami suatu kurikulum. Tanpa adanya kemampuan dalam memahami kurikulum pendidikan, maka akan sulit bagi guru dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik.

Pengembangan kurikulum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995 yaitu pengembangan kurikulum yang bersifat pembaruan dan bersifat penyempurnaan dengan kriteria serta bukti fisik yang telah ditentukan. Menurut Buku *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* menyatakan "Pengembangan adalah merupakan suatu kegiatan yang dapat berupa perancangan, perencanaan atau rekayasa yang dilakukan dengan berdasar metode berpikir ilmiah, guna memecahkan permasalahan yang terjadi. Sehingga hasil karya pengembangan berupa pengetahuan ilmiah atau teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut". Sedangkan kurikulum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi kedua (1995: 546) adalah "Perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan". Adapun cakupan kurikulum berisikan uraian bidang studi yang terdiri atas beberapa macam mata pelajaran yang disajikan secara kait berkait.

Mendasarkan pada pengertian tersebut dan dari 2 jawaban responden di atas dapat diambil kesimpulan bahwa : Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme serta pengembangan karier guru melalui kenaikan pangkat dengan sistem angka kredit bagi golongan IV/a ke atas justru dianggap sebagai penghambat/kendala dari tujuan tersebut.

2. Mekanisme Proses Usul Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat dengan menggunakan sistem perhitungan angka kredit (PAK) menuntut keaktifan seseorang yang akan naik pangkat, baik dari segi administrasi maupun teknis, dari segi administrasi harus aktif dalam melengkapi dan menyusun berkas yang dipersyaratkan sedang dari segi teknis pengusul harus mampu memenuhi/membuat persyaratan yang telah ditentukan dan mengetahui mekanisme proses pengusulan yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Wewenang pelaksana program dalam hal ini adalah wewenang pejabat yang menetapkan perhitungan angka kredit (PAK), yaitu Dinas Pendidikan, mulai dari pusat sampai kabupaten. Namun pendelegasian wewenang sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995 kabupaten hanya berhak menetapkan PAK untuk Guru Pratama sampai Guru Muda Tk. I, sedang untuk Guru Madya sampai Guru Dewasa Tk. I ada di tingkat propinsi dan selebihnya, yaitu Guru Pembina ke atas

merupakan kewenangan pusat. Kewenangan inilah yang dianggap oleh guru sebagai hal yang memberatkan.

Berikut ini disajikan tabulasi jawaban responden dalam menanggapi mekanisme proses usul kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas.

Tabel 3.11 Jawaban Responden terhadap Mekanisme Proses Usul dan Keberadaan Tim Teknis

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Dalam era otonomi daerah seperti sekarang kenaikan pangkat PNS semua bisa diselesaikan di daerah mulai pelaksanaan ujian sampai diterbitkannya SK, namun yang kami herankan untuk kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas masih terjadi dualisme sistem kepegawaian yaitu penetapan angka kredit menjadi wewenang pusat dan penerbitan SK wewenang daerah.
2.	Pengawas TK-SD	Sebaiknya proses usul kenaikan pangkat tidak usah sampai pusat, cukup di tingkat propinsi, syukur hanya sampai tingkat kabupaten. Mengingat proses sampai pusat yang sangat panjang sehingga bisa menghabiskan dana dan tenaga yang banyak, padahal guru dituntut harus mengajar di depan kelas setiap hari.
3.	Kepala Sekolah	Jika kenaikan pangkat sebelum mencapai golongan IV/a proses pengusulan angka kredit sampai dengan terbitnya SK bisa diselesaikan di daerah/kabupaten, mengapa untuk kenaikan golongan IV/a ke atas masih harus sampai ke pusat? Padahal sudah otonomi daerah, jika hal semacam ini tidak ada perubahan, saya yakin hampir semua kepala sekolah dan guru SD tidak akan naik pangkat karena beratnya persyaratan.
4.	Guru	Untuk melaksanakan tugas setiap hari saya sudah habis waktunya karena melaju cukup jauh, sehingga tidak tahu dengan tim teknis kabupaten. Apalagi kalau harus mengurus sampai pusat, tenaga dan waktu telah habis untuk melaksanakan tugas dan biaya untuk kebutuhan keluarga, kami cuma bisa pasrah apapun yang akan terjadi.

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas dan hasil wawancara peneliti dengan responden dapat diketahui bahwa semua responden menyatakan keberatan atas mekanisme proses usul kenaikan pangkat dan birokrasi pelaksanaannya terlalu panjang dan berliku-liku sehingga responden tidak mengetahui keberadaan tim teknis jika akan mengusulkan kenaikan pangkat.

Semua responden mengharapkan kewenangan secara penuh didelegasikan ke daerah, setidaknya di tingkat propinsi, mengingat pelaksanaan otonomi daerah secara luas Dinas Pendidikan termasuk lembaga yang ikut dikelola oleh daerah secara langsung. Namun kenyataan di lapangan pelaksanaan otonomi secara luas belum dapat dilaksanakan secara penuh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan undang-undang yang masih bisa dikalahkan dengan keputusan menteri yaitu undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Kepmendikbud No. 025/0/1995 tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Maka dalam pelaksanaan kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas masih harus menggunakan keputusan tersebut. Sehingga kewenangan yang dimiliki daerah sangat kecil dan terbatas pada Guru Pratama sampai Guru Muda Tk. I dan untuk golongan IV/a ke atas, daerah hanya berhak mengusulkan dan penilaian PAK menjadi kewenangan pusat.

3. Kemampuan Responden Terhadap Pengembangan Profesi, Khususnya Karya Ilmiah

Menurut kepmendikbud No. 025/0/1995 yang dimaksud pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu, baik proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya, maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan pengertian karya ilmiah menurut buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di bidang pendidikan dan angka kredit pengembangan profesi guru adalah tulisan yang sedikitnya memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Isi kajian berada pada lingkup pengetahuan ilmu,
- 2) Langkah pengerjaannya dijiwai serta menggunakan metode berpikir ilmiah, dan
- 3) Sosok tampilnya sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu sosok tulisan keilmuan.

Pengetahuan dan kemampuan guru golongan IVa dalam melaksanakan pengembangan profesi khususnya pembuatan karya ilmiah merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat meraih keberhasilan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan responden mengetahui karya ilmiah, disajikan tabulasi jawaban responden berdasarkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Tabel 3.12 Jawaban Responden terhadap Pengetahuan tentang Karya Ilmiah

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Dari hasil rapat dinas dan penataran yang pernah diikuti baik tingkat kabupaten maupun propinsi, sedikit banyak menjadi pengetahuan saya tentang karya ilmiah. Hal ini juga termuat dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995. Sebagai pedoman pelaksanaan, demikian juga di pusat Perpustakaan banyak buku yang memuat tentang tata cara pembuatan karya ilmiah.
2.	Pengawas TK-SD	Sebagai petugas yang mengurus angka kredit guru dituntut untuk menguasai bidang tugasnya, dengan sendirinya kami selalu mengikuti perkembangan yang terus terjadi agar tidak ketinggalan, kami selalu berusaha membaca peraturan-peraturan yang berlaku mulai Kepmenpan, Kepmendikbud, surat edaran kepala BKN, SE Gubernur dan mengikuti penataran dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas guna membekali diri dalam pelaksanaan tugas.
3.	Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan sudah berusaha secara maksimal dengan kemampuan yang ada untuk membantu guru agar dapat menulis karya ilmiah untuk pengembangan profesi. Namun demikian masih belum bisa menggugah semangat guru untuk mengajukan usul kenaikan pangkat golongan IV/a ke IV/b. Hal ini karena masalah yang dihadapi guru sangat kompleks.
4.	Guru	Keterbatasan dana, waktu, tenaga serta kemampuan guru merupakan kendala utama untuk mengajukan kenaikan pangkat. Penataran dan kegiatan dinas seperti KKG juga selalu membahas masalah penulisan karya ilmiah bagi guru pembina, sebenarnya masalah teori sedikit mengetahui tetapi untuk mempraktekkan berat sekali

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden pernah mempelajari karya ilmiah, baik diperoleh melalui Dinas Pendidikan, buku-buku bacaan maupun penataran dan pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar guru responden memiliki kemampuan dalam pembuatan karya ilmiah. Pelatihan merupakan faktor yang sangat penting bagi guru agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam membuat karya ilmiah guna memenuhi persyaratan angka kredit yang ditentukan dalam Kepmendikbud tersebut.

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesionalisme kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa responden pernah mempelajari karya ilmiah bidang pendidikan dan pernah mengikuti pelatihan tentang pembuatan karya ilmiah berarti responden sudah memiliki pengetahuan, bahkan mungkin kemampuan tentang pembuatan karya ilmiah. Untuk mengetahui kemampuan responden tentang karya ilmiah disajikan tabulasi jawaban responden tentang pembuatan karya ilmiah.

b. Faktor Internal

Tabel 3.13 Jawaban Responden terhadap Pembuatan Karya Ilmiah

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Penyusunan atau pembuatan karya ilmiah itu sangat sulit, hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan di lapangan bahwa sampai saat ini di Kecamatan Sulang belum ada guru dan kepala sekolah yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b.
2.	Pengawas TK-SD	Salah satu persyaratan kenaikan pangkat bagi guru pembina golongan IV/a ke atas adalah kegiatan pengembangan profesi melalui penyusunan karya ilmiah, tujuan dari pengembangan profesi adalah agar guru memiliki kemampuan profesional sehingga akan lebih profesional dalam bekerja. Namun hampir semua guru enggan untuk melaksanakan pengembangan profesi.
3.	Kepala Sekolah	Bagi kami golongan IV/a sudah sangat cukup dan bersyukur karena tidak mengira kalau akan sampai pada golongan tersebut. Selain hal tersebut kalau untuk membuat karya ilmiah kami tidak mampu dari segi pengetahuan maupun pendanaan.
4.	Guru	Kecuali sulit bagi guru SD untuk membuat karya ilmiah, juga akan sia-sia saya, mengingat kepala SMA yang menjadi guru teladan nasional saja membuat karya ilmiah juga berkali-kali dikembalikan, apalagi cuma guru SD dan tamatan SPG.

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel di atas bahwa 35 responden menyatakan pernah membuat karya ilmiah dan 17 responden belum pernah membuat karya ilmiah. Namun berdasarkan data dan keterangan responden ternyata yang

pernah membuat adalah responden yang berpendidikan D2 dan S1 dan yang belum pernah adalah responden yang berpendidikan SPG. Adapun yang pernah membuat adalah karya ilmiah waktu membuat tugas akhir sewaktu kuliah.

Berdasarkan wawancara, semua guru yang sudah golongan IV/a di Kecamatan Sulang baik yang sudah empat tahun lebih maupun yang masih kurang belum pernah ada yang membuat pengembangan profesi, baik karya ilmiah, alat peraga pelajaran, karya seni, teknologi tepat guna dan pengembangan kurikulum seperti yang dipersyaratkan dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995 untuk pengajuan angka kredit dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat. Kejadian seperti ini dapat diasumsikan sebagai berikut :

- 1) Guru/Responden sudah tidak termotivasi dengan persyaratan yang dianggap sangat memberatkan.
- 2) Kurangnya kemampuan pengetahuan guru dalam membuat karya ilmiah, apalagi dalam hal tulis menulis yang benar.
- 3) Sudah merasa cukup dan bersyukur dengan pangkat dan golongan yang diperoleh yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- 4) Apatis guru karena berliku-liku dan panjangnya prosedur yang harus dilalui serta sulitnya keberhasilan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

- 5) Kurangnya partisipasi pemerintah baik dalam hal koordinasi, penguasaan materi dan pendanaan dalam kegiatan pengembangan profesi.

Menurut pandangan penulis, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Responden/guru serta partisipasi pemerintah belum sepadan jika dibandingkan dengan beratnya persyaratan yang ditetapkan dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995, sehingga dari 315 guru golongan IVa hanya 1 guru di Kecamatan Sulang yang dapat mengusulkan kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor internal guru golongan IVa sendiri.

Implementasi Kepmendikbud No. 025/0/1995 bertujuan untuk pengembangan karier dan meningkatkan profesionalisme guru, tapi kenyataan bagi Guru Pembina IV/a ke atas berdampak kebalikan dari tujuan yang diharapkan. Implementasi keputusan tersebut akan berdampak kurang baik terhadap pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme guru terhadap pembelajaran karena terjadi stagnasi kenaikan pangkat Guru Pembina (IV/a).

C. Evaluasi Kebijakan

1. Efektivitas

Dalam mengukur efektifitas kebijakan kenaikan pangkat guru golongan IVa ke atas berdasarkan Kepmendikbud No 025/0/1995 dapat dilihat dari banyaknya guru yang mengajukan kenaikan pangkat dari IV/a

ke golongan IV/b di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Dari guru golongan IVa sebanyak 315 guru dalam kurun waktu 2008-2010 tidak ada guru golongan IVa yang mengajukan kenaikan pangkat ke IVb.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang yang menyatakan bahwa:

Penyusunan atau pembuatan karya ilmiah itu sangat sulit, hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan di lapangan bahwa sampai saat ini di Kecamatan Sulang belum ada guru dan kepala sekolah yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b.¹

Di Kecamatan Sulang dari 315 guru yang mempunyai golongan IVa belum ada yang mengajukan kenaikan pangkat ke golongan IV menunjukkan tidak efektifnya implementasi Kepmendikbud No 025/0/1995

2. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan bagaimana implementasi kenaikan pangkat tersebut diukur dari waktu dan biaya yang dibutuhkan guru untuk mengurus kenaikan pangkat.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang kenaikan pangkat PNS semua bisa diselesaikan di daerah mulai pelaksanaan ujian sampai diterbitkannya SK, namun yang kami herankan untuk kenaikan pangkat guru golongan IV/a ke atas masih terjadi dualisme sistem kepegawaian

¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Ag, S.Pd selaku Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang tanggal 3 Februari 2011.

yaitu penetapan angka kredit menjadi wewenang pusat dan penerbitan SK wewenang daerah

Berdasarkan keterangan Bapak Sunarto selaku Guru SD Sulang II keterbatasan dana, waktu, tenaga serta kemampuan guru merupakan kendala utama untuk mengajukan kenaikan pangkat. Penataran dan kegiatan dinas seperti KKG juga selalu membahas masalah penulisan karya ilmiah bagi guru pembina, sebenarnya masalah teori sedikit mengetahui tetapi untuk mempraktekkan berat sekali.²

Untuk melaksanakan tugas setiap hari saya sudah habis waktunya karena melaju cukup jauh, sehingga tidak tahu dengan tim teknis kabupaten. Apalagi kalau harus mengurus sampai pusat, tenaga dan waktu telah habis untuk melaksanakan tugas dan biaya untuk kebutuhan keluarga, kami cuma bisa pasrah apapun yang akan terjadi.³

Jika kenaikan pangkat sebelum mencapai golongan IV/a proses pengusulan angka kredit sampai dengan terbitnya SK bisa diselesaikan di daerah/kabupaten, mengapa untuk kenaikan golongan IV/a ke atas masih harus sampai ke pusat? Padahal sudah otonomi daerah, jika hal semacam ini tidak ada perubahan, saya yakin hampir semua kepala sekolah dan guru SD tidak akan naik pangkat karena beratnya persyaratan.⁴

Dalam kenaikan pangkat golongan IVa ke IVb agar tercipta efisiensi waktu dan biaya sebaiknya proses usul kenaikan pangkat tidak

² Wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Guru SD SulangII tanggal 14 Februari 2011.

³ Wawancara dengan Bapak Sukarji selaku Guru SD Pemadu I tanggal 15 Februari 2011

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Afif selaku Pengawas TK-SD Kecamatan Sulang Tanggal 15 Februari 2011.

usah sampai pusat, cukup di tingkat propinsi, syukur hanya sampai tingkat kabupaten. Mengingat proses sampai pusat yang sangat panjang sehingga bisa menghabiskan dana dan tenaga yang banyak, padahal guru dituntut harus mengajar di depan kelas setiap hari.⁵

3. Kecukupan

Sehubungan dengan implementasi Kepmendikbud No. 025/0/1995 yang dirasa memberatkan guru untuk meraih pangkat dan jabatan yang lebih tinggi, khususnya untuk guru pembina golongan IV/a ke atas dengan sendirinya guru tidak termotivasi dalam melaksanakan tugas karena terjadi demotivasi pada golongan IV/a. Hal ini secara otomatis berpengaruh terhadap partisipasi guru dalam pembelajaran. Untuk mengungkap sampai seberapa jauh partisipasi guru dalam pembelajaran, berikut disajikan tabulasi sebagai berikut :

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, S.Ag, S.Pd selaku Kacabdin Kecamatan Sulang tanggal 15 Februari 2011

Tabel 3.14 Jawaban Responden Terhadap Partisipasi Pembelajaran dan Kemasyarakatan

No	Responden	Jawaban
1.	Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang	Baik secara langsung maupun tidak langsung stagnasi kenaikan pangkat guru berpengaruh di semua kegiatan, baik di sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain partisipasi menurun, contoh guru yang tadinya mengajar bakat A/B tiba-tiba minta berhenti.
2.	Pengawas TK-SD	Pelaksanaan tambahan (les) bagi kelas V dan VI yang semula dipegang oleh guru senior, sekarang berbalik arah. Guru-guru baru yang giat melaksanakan les dengan harapan bisa menambah angka kredit.
3.	Kepala Sekolah	Meskipun melaksanakan tugas mengajar dengan baik, mengikuti pelatihan dan pengabdian pada masyarakat dengan aktif, kalau tidak dapat membuat karya ilmiah, sampai sepuluh tahun pun tetap jalan di tempat, lalu apa gunanya bekerja dengan baik kalau tidak ada imbalan yang sesuai.
4.	Guru	Mengajar adalah pekerjaan yang sudah menjadi cita-citanya dan sangat ditekuni, tapi kalau dalam waktu-waktu menjelang batas waktu usia pensiun tidak ada penghargaan, ya lebih baik bekerja untuk menunggu waktu pensiun tiba.

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan jawaban responden pada tabel di atas serta hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Guru akan berpartisipasi dalam proses pembelajaran kalau guru tersebut mendapatkan motivasi dari hasil kerjanya.

- 2) Stagnasi yang berkepanjangan menjadikan sindrom bagi guru karena pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama akan menimbulkan kebosanan apalagi kalau tidak ada pengaruhnya terhadap perbaikan kehidupan.
- 3) Guru mengajar sekedar memenuhi kewajiban sebagai pengawas karena usaha apapun dilaksanakan dengan baik kalau tidak dapat memenuhi syarat pengembangan profesi tidak dapat naik.

4. **Responsibilitas**

Terkait dengan responsibilitas yang dilakukan aparaturnya pelaksana terkait kenaikan pangkat golongan IVa ke atas telah dilakukan sosialisasi terkait Kepmendikbud di semua sekolah.

Sebagai seorang yang diberi tanggung jawab membina dan mengurus kepegawaian guru termasuk kenaikan pangkat di tingkat kecamatan, maka secara terus menerus mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku disosialisasikan kepada guru.⁶

Kenaikan pangkat adalah harapan dan keinginan semua guru, untuk mengetahui persyaratan tersebut semua guru harus membaca Kepmendikbud No. 025/0/1995 yang sudah diberikan dari dinas kepada semua sekolah

Semua persyaratan kenaikan pangkat termuat dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995, keputusan tersebut ada di sekolah dan selalu dibaca oleh guru yang akan naik pangkat untuk mempersiapkan

⁶ Wawancara dengan Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang

berkas pengusulan, tapi ada suatu persyaratan yang sangat berat untuk dilaksanakan.

Dari hasil rapat dinas dan penataran yang pernah diikuti baik tingkat kabupaten maupun propinsi, sedikit banyak menjadi pengetahuan saya tentang karya ilmiah. Hal ini juga termuat dalam Kepmendikbud No. 025/0/1995. Sebagai pedoman pelaksanaan, demikian juga di pusat Perpusda banyak buku yang memuat tentang tata cara pembuatan karya ilmiah.

Sebagai petugas yang mengurus angka kredit guru dituntut untuk menguasai bidang tugasnya, dengan sendirinya kami selalu mengikuti perkembangan yang terus terjadi agar tidak ketinggalan, kami selalu berusaha membaca peraturan-peraturan yang berlaku mulai Kepmenpan, Kepmendikbud, surat edaran kepala BKN, SE Gubernur dan mengikuti penataran dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas guna membekali diri dalam pelaksanaan tugas.⁷

Dinas Pendidikan sudah berusaha secara maksimal dengan kemampuan yang ada untuk membantu guru agar dapat menulis karya ilmiah untuk pengembangan profesi. Namun demikian masih belum bisa menggugah semangat guru untuk mengajukan usul kenaikan pangkat golongan IV/a ke IV/b. Hal ini karena masalah yang dihadapi guru sangat kompleks.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Afif selaku Pengawas TK-SD Kecamatan Sulang

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukaryo selaku Kepala Sekolah SD Landoh II

Saat ini jumlah guru yang telah berada pada golongan IVa sangatlah banyak. Sementara itu, guru yang sudah bergolongan IVb ke atas jumlahnya relatif sedikit. Banyak keluhan atas hal itu. Di antaranya dengan “menyalahkan” adanya persyaratan angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi. Atau bahkan menyatakan, kegagalan itu akibat banyaknya KTI yang ditolak.

Dari pengamatan di lapangan, yang terjadi adalah masih sedikit guru golongan IVa yang telah mengajukan usulan kenaikan pangkatnya. Salah satu alasannya adalah kekurangmampuan dan ketidakmauan. Banyak guru merasa kurang mampu membuat kti. Juga tidak sedikit yang kurang mau. Untuk itu penjelasan tentang bagaimana sebenarnya KTI pengembangan profesi itu (yang tidak “sesulit dan setara” KTI untuk skripsi, tesis apalagi disertasi) sangat perlu lebih dijelaskan pada para guru. Sosialisasi tersebut hendaknya juga ditujukan tidak hanya meningkatkan kemampuan tetapi yang lebih penting adalah untuk juga meningkatkan kemauan guru.

5. Ketepatan

Implementasi Kepmendikbud No. 025/0/1995 bertujuan untuk pengembangan karier dan meningkatkan profesionalisme guru, tapi kenyataan bagi Guru Pembina IV/a ke atas berdampak kebalikan dari tujuan yang diharapkan. Implementasi keputusan tersebut akan berdampak kurang baik terhadap pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme guru terhadap pembelajaran karena terjadi stagnasi kenaikan pangkat Guru Pembina (IV/a).

Diberlakukannya Kepmendikbud No. 025/0/1995 diharapkan dapat menjadi motivator bagi guru dalam pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme, agar guru selalu berlomba untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran. Pelaksanaan keputusan ini benar-benar menjadi stimulan bagi Guru Pratama sampai Guru Dewasa Tk. I, karena kariernya bisa meningkat tiap dua tahun sekali tanpa membuat *pengembangan profesi*. Namun bagi Guru Pembina ke atas, motivator tersebut hilang begitu saja berubah menjadi *demotivator*, bahkan pelaksanaan keputusan tersebut cenderung dan dapat menjadi *motivator negatif* yaitu motivasi yang menimbulkan rasa cemas, takut seperti ancaman, tekanan, intimidasi dan lain-lain. Pemberlakuan keputusan bagi guru golongan IV/a juga menimbulkan rasa takut, cemas juga guru merasa tertekan dan terancam kariernya. Hal ini terungkap dari jawaban responden sebagai berikut :

Dengan terjadinya stagnasi guru pembina golongan IV/a yang semakin banyak dan belum ada realisasi kenaikan pangkat ke IV/b, maka banyak guru yang terlihat murung dan kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas.⁹

Bagi guru yang masih muda dan terpaksa harus berhenti pada golongan IV/a dan pensiun masih lama, kadang-kadang memperlihatkan

⁹ Wawancara dengan Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sulang

perilaku yang aneh-aneh seperti acuh tak acuh jika pengawas mengadakan supervisi.¹⁰

Sebenarnya semua ingin mengusulkan kenaikan pangkat tapi setelah melihat peraturan dengan persyaratan dan mekanisme yang sangat berat maka merasa takut dan cuma bisa berharap kenaikan pengabdian. Namun hal ini menimbulkan frustrasi guru sehingga tidak masuk.¹¹

Buat apa kita mengajar sebaik dan setertib seperti dahulu, kalau akhirnya cuma sia-sia tidak dapat naik pangkatnya bertahun-tahun, lebih baik yang santai karena sudah tidak ada harapan pada pengembangan karier

Berdasarkan pendapat tersebut, guru sudah takut dengan persyaratan yang ditentukan berarti terancam kenaikan pangkatnya dengan kata lain harus berhenti di tempat sampai pensiun. Stagnasi guru pembina yang berlangsung lama dalam jumlah besar bisa berdampak buruk bagi kedua belah pihak baik bagi guru sebagai sasaran kebijakan maupun pemerintah selaku penentu kebijakan (*policy making*). Stagnasi atau karier yang berhenti merupakan *sindrom* “kesempatan terhalang”. Kesempatan terhalang ini memanifestasikan diri dalam berbagai cara yang berbeda dan setiap cara dapat mengganggu dimana guru bekerja”.

Beberapa guru dengan kesempatan terhalang menyimpulkan bahwa sistem kebijakan yang ada sengaja membatasi sampai batas/pangkat tertentu. Kebijakan yang diharapkan agar tetap dapat naik

¹⁰ Wawancara dengan Pengawas TK-SD Kecamatan Sulang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pardi HS selaku Kepala Sekolah SD Sulang I

kariernya berdasarkan masa pengabdian yang hampir 25 tahun kemudian kebijakan tersebut berantakan. Sama halnya dengan guru yang menuduhkan penyalahgunaan kebijakan sebagai penyebab terhentinya mereka, kelompok ini biasanya menunjukkan frustrasi mereka dengan berbagai cara seperti menolak program pengembangan diri apapun yang disarankan oleh atasan bahkan bisa mencari pengakuan di luar organisasi. Guru semacam ini juga cenderung melakukan pekerjaan mereka dengan cara semudah mungkin, meskipun cara itu bukan cara yang benar. Jika guru telah memilih untuk mendapat pengakuan dari luar organisasi karena kesempatan terhalang di tempat pekerjaan, mengapa tidak menghindari pelaksanaan kebijakan yang demikian.